

Obedience vs Critical Thinking dalam PPKn Menuju Patriotisme Kritis

Kameliani Diasoleha Walidatun

¹ Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Corresponding Author: kamelianidw@gmail.com^{1*}

Info Artikel

Submitted: 20 Juli 2026

Revised : 14 Agustus 2026

Accepted: 20 September 2026

Published: 17 Oktober 2026

Keywords: obedience; critical thinking; PPKn; military values; critical patriotism

Kata Kunci: ketaatan; berpikir kritis; PPKn; nilai militer; patriotisme kritis

Abstract

This study examines the philosophical tension between obedience-oriented military values and the democratic objective of fostering critical thinking in Pancasila and Civic Education (PPKn). The study addresses the persistent gap between the normative goals of democratic civic education and transmissive classroom practices shaped by Indonesia's authoritarian educational legacy. Using a systematic literature review with philosophical and conceptual analysis, 21 sources published between 2015 and 2025 were synthesized, comprising 20 indexed national and international journal articles and one reference monograph. The findings reveal four main points. First, transmissive PPKn practices are historically rooted in the use of education for collective identity formation and social control. Second, discrepancies between curriculum ideals and classroom practices arise from structural constraints involving curriculum design, assessment systems, teacher support, and institutional culture. Third, the tension between transmissive and transformative paradigms reflects a broader ideological struggle over the meaning of a good citizen. Fourth, the study proposes critical patriotism as a conceptual synthesis in which commitment to Pancasila emerges through critical understanding rather than blind obedience. This framework offers a contextually grounded pathway for developing reflective, democratic, and value-committed citizens in post-authoritarian Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji ketegangan filosofis antara nilai kepatuhan bercorak militer dan tujuan demokratis untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Kajian ini berangkat dari kesenjangan antara tujuan normatif pendidikan kewarganegaraan demokratis dan praktik pembelajaran transmisif yang dipengaruhi warisan pendidikan otoriter di Indonesia. Penelitian menggunakan kajian literatur sistematis dengan analisis filosofis dan konseptual terhadap 21 sumber terbitan 2015–2025, terdiri atas 20 artikel jurnal nasional dan internasional terindeks serta satu monografi referensi. Hasil penelitian menunjukkan empat temuan utama. Pertama, praktik transmisif PPKn berakar pada sejarah pemanfaatan pendidikan untuk pembentukan identitas kolektif dan kontrol sosial. Kedua, kesenjangan antara tujuan kurikulum dan praktik kelas dipengaruhi kendala struktural dalam desain kurikulum, sistem penilaian, dukungan guru, dan budaya institusi. Ketiga, ketegangan paradigma transmisif dan transformatif mencerminkan perjuangan ideologis mengenai makna warga negara yang baik. Keempat, penelitian ini menawarkan patriotisme kritis sebagai sintesis konseptual, yaitu komitmen terhadap Pancasila yang tumbuh melalui pemahaman kritis, bukan kepatuhan buta. Kerangka ini menawarkan arah kontekstual untuk membentuk warga negara yang reflektif, demokratis, dan berkomitmen

pada nilai dalam konteks Indonesia pasca-otoriter.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Pendidikan kewarganegaraan dalam lingkungan negara yang demokratis selalu mengalami tantangan fundamental bagaimana menciptakan warga negara yang tidak hanya patuh tetapi juga kritis. Di Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki dua misi tersebut memperkuat semangat kebangsaan, kepatuhan terhadap aturan, sambil sekaligus mendorong keterlibatan aktif dan kemampuan berpikir kritis di antara warga negara (Sunarso et al., 2024). Dua misi ini secara inheren mengandung ketegangan filosofis yang belum sepenuhnya teratasi baik dalam teori maupun praktik pendidikan di Indonesia.

Tegangan itu semakin jelas ketika dihadapkan dengan warisan nilai-nilai militer dalam budaya pendidikan nasional. Sejak zaman Orde Baru, sistem pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh kultur otoriter yang menjadikan kepatuhan, disiplin, dan hierarki sebagai nilai utama. Nilai-nilai Pancasila pada waktu itu lebih berfungsi sebagai alat pengendalian sosial daripada sebagai landasan yang mendukung demokrasi dan emansipasi. Sebagai hasilnya, metode pembelajaran yang bersifat transmisif di mana pengetahuan dan nilai disalurkan dari atas ke bawah tanpa kesempatan untuk bernegosiasi secara kritis menjadi norma hingga saat ini. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan masih sangat fokus pada konten dan ujian, yang membatasi kesempatan untuk dialog terbuka, penyelidikan kritis, dan partisipasi dalam kewarganegaraan yang lebih aktif.

Di sisi lain, pendekatan filsafat pendidikan kritis dan teori pendidikan yang berorientasi pada demokrasi menekankan bahwa kemampuan berpikir secara kritis adalah suatu keahlian dasar yang wajib dimiliki dalam menciptakan warga negara yang bertanggung jawab. Dalam konteks ini, pendidikan lebih dari sekadar proses menyalurkan nilai-nilai dan pengetahuan, melainkan merupakan suatu proses yang mengubah yang memungkinkan siswa untuk mempertanyakan, menganalisis, serta bahkan melawan struktur sosial yang ada. Kemampuan berpikir kritis dalam konteks pendidikan PPKn mencakup kekuatan siswa untuk memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, menilai kebijakan publik, serta terlibat secara aktif dan reflektif dalam kehidupan demokrasi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebenarnya memerlukan alat dan pendekatan

yang dirancang khusus untuk merangsang keterampilan berpikir kritis pada siswa, bukan hanya sekedar mengukur penguasaan materi (Zakiah, 2021). Selanjutnya, Sunarso et al. (2024) melalui kajian filosofis tentang kurikulum PPKn menyimpulkan bahwa untuk mengembangkan identitas kewargaan siswa, dibutuhkan kerangka filosofis yang saling terhubung, bukan hanya sekedar penumpukan materi normatif. Namun, studi-studi tersebut belum berhasil memetakan dengan jelas ketegangan konseptual antara nilai-nilai militer (kepatuhan) dan sasaran demokratis (berpikir kritis) sebagai suatu isu filsafat pendidikan yang perlu dianalisis secara mendalam.

Kondisi ini juga ditekankan oleh Murdiono & Wuryandani (2021) yang menemukan bahwa pendidikan kewarganegaraan untuk generasi muda Indonesia dizaman globalisasi masih menghadapi tantangan struktur yang cukup serius, yaitu ketidakmampuan kurikulum dalam menghubungkan nilai-nilai nasionalisme dengan keterampilan penting yang diperlukan dalam kehidupan demokratis saat ini. Di sisi lain, menekankan bahwa Indonesia memerlukan perubahan paradigma yang mendasar dalam pendidikan kewarganegaraan dari sekedar memproduksi warga negara yang baik dan patuh menjadi warga negara yang aktif, reflektif, dan mampu memberikan kontribusi secara kritis dalam kehidupan masyarakat. Ironisnya, perubahan paradigma ini belum sepenuhnya terwujud dalam praktik pembelajaran PPKn yang berlangsung dikelas-kelas diseluruh Indonesia.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menyelidiki ketegangan konseptual antara nilai-nilai militer yang mengutamakan ketaatan dan tujuan PPKn demokratis yang mendorong pemikiran kritis. Selain itu, penelitian ini juga mengusulkan sintesis konseptual yang dapat menjembatani kedua aspek tersebut dengan cara yang produktif. Melalui analisis literatur secara sistematis dari sumber-sumber jurnal nasional dan internasional dalam rentang waktu 2015 hingga 2025, penelitian ini membangun argumen bahwa ketegangan ini tidak perlu dilihat sebagai dikotomi yang tidak dapat diselesaikan. Sebaliknya, dengan memperkenalkan konsep patriotisme kritis, ketaatan dan pemikiran kritis dapat digabungkan secara sinergis membuat ketaatan bukan sekedar penyerahan tanpa pertimbangan, tetapi sebagai komitmen yang reflektif terhadap nilai-nilai demokrasi yang diinternalisasi dan dipahami secara kritis oleh para pelajar (Westheimer & Kahne, 2004).

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode ulasan literatur sistematis dengan desain analisis filsafat dan konseptual. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah eksplorasi dan interpretasi, yaitu untuk mengkaji ketegangan antara nilai-nilai militer seperti kepatuhan dan tujuan demokrasi seperti berpikir kritis dalam konteks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) melalui perspektif

filosafat pendidikan. Ulasan literatur sistematis memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menemukan, menilai, dan menggabungkan hasil dari berbagai studi yang relevan dengan cara yang metodis dan jelas, sehingga menghasilkan kesimpulan konseptual yang lebih kuat dibandingkan dengan ulasan naratif biasa.

Berbeda dari penelitian empiris yang bergantung pada pengumpulan data dari lapangan, penelitian ini memfokuskan pada teks akademik sebagai sumber data utama. Analisis dilakukan terhadap argumen, konstruksi teoritis, dan temuan empiris yang terdapat dalam literatur, selanjutnya disintesis menjadi sebuah kerangka konseptual baru yaitu patriotisme kritis yang berfungsi sebagai jembatan antara dua nilai yang selama ini dianggap saling bertentangan. Sumber informasi untuk penelitian ini berasal dari artikel jurnal baik nasional maupun internasional yang diterbitkan dalam periode 2015 hingga 2025. Penelusuran literatur dilakukan melalui sejumlah database akademik yang memiliki reputasi tinggi, antara lain: Google Scholar, ERIC (Pusat Informasi Sumber Daya Pendidikan), Scopus, serta portal jurnal nasional yang terakreditasi yakni Sinta. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian, baik secara tunggal maupun dalam kombinasi, meliputi: ketaatan, pemikiran kritis, pendidikan kewarganegaraan, PPKn, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai militer, pendidikan demokratis, pedagogi kritis, serta filsafat pendidikan. Proses seleksi literatur dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas untuk inklusi dan eksklusi sebagai berikut.

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi Seleksi Literatur

Aspek	Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Tahun Publikasi	2015–2025	Di luar rentang 2015–2025
Identifikasi	Memiliki DOI aktif dan terverifikasi	Tidak memiliki DOI atau sumber tidak terverifikasi
Topik	Relevan: PPKn, kewarganegaraan, filsafat pendidikan kritis, nilai demokrasi	Tidak relevan secara tematik berupa opini/editorial tanpa analisis mendalam
Bahasa	Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris	Bahasa selain Indonesia dan Inggris
Indeksasi	Jurnal terindeks Sinta 1–3 (nasional) atau Scopus/WoS (internasional)	Artikel duplikasi dari berbagai sumber

Dari proses pencarian awal, ditemukan lebih dari 80 artikel yang berpotensi. Setelah dilakukan penyaringan judul dan ringkasan serta evaluasi kelayakan dari teks penuh, sebanyak 20 sumber utama ditetapkan sebagai inti analisis, didampingi oleh satu sumber buku monografi referensial (Giroux, 2020) yang dijadikan landasan teori. Pemilihan jumlah ini berdasarkan prinsip kedalaman analisis (*depth over breadth*) yang sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat

konseptual-filosofis (Chalaune, 2021). Sebagai dasar teori tambahan, penelitian ini juga mengacu pada pemikiran Nugraha et al. (2024) yang ideologi hubungan pedagogi kritis Freire dengan perubahan Pendidikan saat ini, serta Takona (2025) yang menekankan bahwa prinsip-prinsip Freire tetap relevan Ketika dibahas pada isu-isu Pendidikan kewarganegaraan di zaman modern. Kedua referensi tersebut digunakan secara teleskopik untuk memperkuat kerangka pedagogi kritis yang menjadi salah satu landasan analisis dalam penelitian ini, tanpa mengurangi kedalaman pembahasan yang telah diuraikan oleh Giroux (2020) sebagai sumber monografi utama.

Prosedur riset ini dilaksanakan dalam tiga langkah berurutan, yaitu identifikasi, evaluasi, dan sintesis. Dalam langkah identifikasi, peneliti melakukan pencarian referensi secara sistematis dengan memanfaatkan kombinasi kata kunci yang telah ditentukan. Setiap artikel yang ditemukan dicatat metadata-nya secara lengkap, mencakup penulis, tahun publikasi, judul, nama jurnal, volume, nomor, halaman, dan DOI. Langkah ini menghasilkan daftar awal artikel calon yang kemudian disaring dengan membaca judul dan abstrak.

Pada langkah evaluasi, artikel yang lolos pemilihan awal dibaca secara menyeluruh untuk menilai relevansi, kedalaman argumen, dan kualitas metodologinya. Penilaian kualitas dilakukan dengan menggunakan kerangka adaptif yang mempertimbangkan tiga dimensi: (1) kejelasan pertanyaan/tujuan riset, (2) kesesuaian metode dengan tujuan, dan (3) validitas kesimpulan yang diambil. Artikel yang memenuhi kriteria kualitas ini kemudian menjadi sumber utama dalam analisis. Di langkah sintesis, data konseptual dari setiap artikel diekstraksi dan dikelompokkan sesuai dengan tema-tema yang muncul secara berulang. Tema-tema utama yang diidentifikasi meliputi: (a) nilai kepatuhan dalam konteks pendidikan militer dan masa Orde Baru; (b) tujuan demokrasi dalam kurikulum PPKn, (c) pendekatan transmisif versus transformatif dalam pengajaran, serta (d) pemahaman tentang warga negara yang baik dalam filsafat pendidikan kritis. Sintesis lintas tema inilah yang menghasilkan konstruk patriotisme kritis sebagai proposisi konseptual utama dari penelitian ini.

Analisis yang dilakukan dalam studi ini dibangun atas dua kerangka teoretis yang dipadukan dengan pendekatan dialektis. Yang pertama adalah kerangka tipologi kewarganegaraan menurut Westheimer & Kahne (2004) yang mengklasifikasikan tiga tipe warga negara bertanggung jawab secara pribadi, berpartisipasi, dan berorientasi pada keadilan diperlukan untuk menilai posisi PPKn dalam konteks tujuan demokrasi. Yang kedua, kerangka pedagogi kritis yang diturunkan dari pemikiran Giroux (2020) digunakan untuk mengeksplorasi implikasi filosofis dari pendekatan instruktif yang dominan di dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

Kedua kerangka tersebut tidak diterapkan secara terpisah, tetapi berfungsi dalam dialog interpretatif yang bertujuan menciptakan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana integrasi nilai kepatuhan dan kemampuan berpikir kritis dapat dilakukan, alih-alih dipertentangkan. Wicaksana (2024) serta Suprayogi et al. (2024) dijadikan sumber rujukan kontekstual untuk memastikan bahwa analisis tetap terhubung dengan realitas sejarah dan kurikulum PPKn di Indonesia, sementara Banks (2017) dan Agus et al. (2025) berperan sebagai penghubung antara sudut pandang global dan konteks lokal dari pendidikan kewarganegaraan di Asia Tenggara.

Sementara itu, keterbatasan utama dari penelitian ini terletak pada penggunaan bahasa sumber yang hanya mencakup artikel dalam bahasa Indonesia dan Inggris, sehingga ada kemungkinan bahwa literatur relevan dalam bahasa lainnya tidak terjaring. Di samping itu, sebagai sebuah kajian konseptual, hasil penelitian ini belum diuji secara empiris di lapangan dan memerlukan validasi lebih lanjut melalui penelitian yang berbasis data primer, seperti etnografi kelas atau wawancara mendalam dengan guru dan siswa PPKn.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan metode pemilihan literatur sistematis yang mengikuti pedoman PRISMA 2020, telah ditemukan 21 sumber yang menjadi fokus analisis utama yang terdiri dari 20 artikel dari jurnal baik nasional maupun internasional serta satu buku referensi Giroux (2020) yang digunakan sebagai dasar teori pedagogi kritis. Semua artikel jurnal tersebut memiliki DOI yang aktif dan terkonfirmasi, diterbitkan dalam periode antara tahun 2015 hingga 2025, serta berasal dari jurnal yang terindeks Sinta 1–3 (nasional) atau Scopus/Web of Science (internasional).

Dari keseluruhan sumber yang telah diuraikan, teridentifikasi tiga tema utama yang muncul secara berulang dan saling berinteraksi. Pertama, tema tentang warisan nilai-nilai otoriter dalam pendidikan, yang mengungkapkan bagaimana budaya kepatuhan dari zaman Orde Baru masih mempengaruhi praktik pembelajaran PPKn hingga saat ini (Farchan, 2022; Nasoha et al., 2024; Suprayogi et al., 2024). Kedua, tema yang menunjukkan hubungan antara tujuan kurikulum dan praktik pembelajaran, yang diungkapkan baik secara konsep maupun empiris oleh berbagai penelitian dalam konteks Indonesia maupun Asia Tenggara (Agus et al., 2025; Jayadiputra et al., 2023; Sunarso et al., 2024; Tirza et al., 2025; Wicaksana, 2024; Zakiah, 2021). Ketiga, tema mengenai pentingnya sintesis konsep yang menghubungkan pengertian dan pemikiran kritis, yang tidak terlepas dari kerangka tipologi kesejahteraan, pedagogi kritis, dan patriotisme konstruktif (Banks, 2017; Carrese, 2023; Damanik et al., 2025; Elban & Aslan, 2023; Giroux, 2020; Kaya,

2022; Westheimer & Kahne, 2004). Tema yang ketiga ini menjadi dasar dalam analisis bagian Pembahasan dan menciptakan konstruk konsep sentral penelitian ini, yaitu patriotisme kritis. Ringkasan karakteristik dan temuan utama masing-masing sumber disajikan dalam table 2 berikut.

Tabel 2. Matriks Analisis Sumber Terpilih

No	Penulis dan Tahun	Metode	Temuan Utama	Relevansi dengan Kajian
1.	Nasoha et al. (2024)	Kajian historis deskriptif	Pancasila difungsikan sebagai alat kontrol sosial pada era Orde Baru, bukan sebagai landasan demokrasi	Menjelaskan akar sejarah pendekatan transmisif dalam PPKn
2.	Farchan (2022)	Analisis politik-sejarah	Otoritarianisme Orde Baru bekerja melalui normalisasi kepatuhan dan internalisasi hierarki sebagai sistem yang alami	Memperkuat argumen warisan nilai otoriter dalam budaya pendidikan nasional
3.	Suprayogi et al. (2024)	Kajian konseptual	Ketegangan antara internalisasi nilai dan indoktrinasi Pancasila dalam PPKn belum terpecahkan secara pedagogis	Mendukung argumen ketegangan transmisif vs transformatif
4.	Sunarso et al. (2024)	Analisis isi kurikulum	Terdapat gambaran signifikan antara tujuan kurikuler dan praktik pembelajaran PPKn di kelas	Memperkuat inkonsistensi antara tujuan normatif dan praktik PPKn
5.	Wicaksana (2024)	Studi kasus etnografis	Pengajaran Pancasila di SIDH masih didominasi hafalan; muncul konflik identitas pada siswa	Mendokumentasikan ketegangan transmisif secara empiris
6.	Zakiah (2021)	Penelitian pengembangan (R&D)	Instrumen penilaian PPKn yang ada belum mampu mengukur kemampuan berpikir kritis secara valid	Menunjukkan hambatan struktural dalam penilaian berpikir kritis
7.	Jayadiputra et al. (2023)	Kajian kurikulum komparatif	Kurikulum PPKn abad ke-21 mengakomodasi pemikiran kritis, namun terdapat kesenjangan implementasi di kelas	Menegaskan urgensi reformasi kurikulum berbasis kompetensi kritis
8.	Tirza et al. (2025)	Penelitian pengembangan	Ketiadaan instrumen penilaian khusus menjadi hambatan terbesar pengakuan berpikir kritis secara institusional	Menguatkan perlunya reformasi sistem evaluasi PPKn
9.	Agus et al. (2025)	Metode campuran (5 sekolah)	Siswa memiliki kesadaran etis tinggi namun partisipasi sipil bersifat pasif, guru terhambatnya faktor sistemik	Memberikan bukti empiris terkini tentang kelemahan potensi kritis dan praktik
10.	Murdiono & Wuryandani (2021)	Sastra Kajian	Kurikulum PPKn belum menghubungkan nilai nasionalisme dengan keterampilan demokratis yang relevan	Memperkuat kebutuhan sintesis konsep patriotisme kritis

Obedience vs Critical Thinking dalam PPKn Menuju Patriotisme Kritis
Kameliani Diasoleha Walidatun

11.	Banks (2017)	Kajian Teoretis	Pendidikan kewarganegaraan transformatif harus melampaui prosedur pengajaran dan lembaga demokratis	Memberikan kerangka kewarganegaraan transformatif dalam sintesis patriotisme kritis
12.	Westheimer & Kahne (2004)	Analisis program pendidikan	Penekanan pada kepatuhan dan kesetiaan dapat bertentangan dengan refleksi kritis yang vital dalam demokrasi	Menyediakan tipologi tiga tipe warga negara sebagai kerangka analisis utama
13.	Nasoha et al. (2024)	Kajian literatur kritis	Model bank Freire masih relevan menggambarkan pendidikan yang menempatkan siswa sebagai penerima pasif	Memperkuat kritik terhadap pendekatan transmisi dalam PPKn
14.	Nugraha et al. (2024)	Kajian konseptual	Konflik transmisif vs transformatif mencerminkan perjuangan ideologi tentang definisi warga negara yang baik	Memperkuat kerangka pedagogi kritis Freire dalam analisis
15.	Takona (2025)	Kajian Teoretis	Gagasan Freire relevan untuk tantangan digital dan geopolitik dalam pendidikan kewarganegaraan modern	Memperluas relevansi pedagogi kritis ke konteks kontemporer
16.	Carrese (2023)	Kajian filosofis	Patriotisme mencerminkan landasan kesiapan demokrasi demokratis berdasarkan pemahaman kritis konstitusi	Menjadi titik perbandingan konsep patriotisme kritis yang diusulkan
17.	Chia & Neoh (2024)	Studi kasus Singapura	Sistem pendidikan yang secara resmi demokratis justru menghasilkan konformitas dan loyalitas pasif kepada negara	Menunjukkan bahwa ketegangan ini bukan hanya isu Indonesia, tetapi tantangan regional Asia Tenggara
18.	Puspita Sari & Suryanings (2023)	Kajian konseptual	Indonesia memerlukan perubahan paradigma dari warga negara patuh menjadi warga negara yang aktif dan reflektif	Memperkuat urgensi reorientasi filosofis kurikulum PPKn
19.	Kaya, 2022)	Pengawasan kuantitatif	Kemampuan kritis berpikir buruk dengan patriotisme konstruktif dan berpikir negatif dengan patriotisme buta	Memberikan bukti empiris langsung yang mendukung premis patriotisme kritis
20.	Elban & Aslan (2023)	Pengawasan kuantitatif	Patriotisme membangun jembatan antara nilai-nilai dasar manusia dan kesejahteraan aktif	Menunjukkan bahwa kesan reflektif mendorong partisipasi demokratis yang lebih bermakna
21.	Damanik et al. (2025)	Studi kasus	Program pendidikan kewarganegaraan TNI di tingkat lokal mulai bergeser dari indoktrinasi menuju internalisasi nilai	Memberikan konteks lokal Indonesia tentang perubahan nilai militer dalam pendidikan kewarganegaraan

Pembahasan

Arti Penting Kepatuhan dalam Pendidikan Militer dan Era Orde Baru

Dalam memahami kepatuhan memiliki peran penting dalam pendidikan di Indonesia, penting untuk melihat konteks sejarahnya. Pancasila diterapkan secara berbeda di setiap periode pemerintahan (Nasoha et al., 2024). Selama era Orde Lama, penanaman nilai Pancasila dilakukan dengan ketat, dengan penekanan pada kepatuhan kepada pemerintah. Pada masa Orde Baru, penerapan Pancasila berubah menjadi alat yang lebih pragmatis digunakan untuk mengendalikan masyarakat dan meredam berbagai pandangan ideologis. Hanya pada masa Reformasi terjadi pergeseran pemikiran yang lebih terbuka, meskipun warisan pendekatan yang otoriter masih tetap muncul dalam praktik pembelajaran di kelas.

Dinamika system politik otoriter Orde Baru tidak hanya membentuk wajah politik Indonesia, tetapi juga merasuki budaya institusi Pendidikan secara mendalam. Otoritarianisme Orde Baru berfungsi melalui cara-cara yang lebih halus dibandingkan dengan hanya penekanan fisik melainkan bergerak melalui normalisasi kepatuhan, produksi pengetahuan yang terjaga, dan internalisasi hierarki sebagai system yang di anggap alami (Farchan, 2022). Dalam konteks ini, mata Pelajaran PPKn lahir dan berkembang bukan sebagai sarana untuk menciptakan warga negara yang berpikir kritis, melainkan sebagai alat untuk melegitimasi ideologi yang memperkuat hubungan vertikal antara negara dan para warganya. Warisan ini, sebagaimana yang disiskusikan Farchan (2022) tidak serta merta hilang setelah Reformasi 1998 melainkan tetap ada dalam bentuk habitus institusional yang masih menempatkan guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dan siswa sebagai penerima pasif.

Warisan sejarah ini telah membentuk apa yang oleh para ahli pendidikan kritis sebut sebagai model bank dalam proses belajar atau yang dikenal dengan istilah bank model, yang merupakan sebuah gambaran yang menunjukkan siswa sebagai penerima pasif yang hanya mendapatkan pengetahuan serta nilai dari guru sebagai sosok yang berkuasa (Chalaune, 2021). Dalam ruang lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, model tersebut terlihat dari lebihnya fokus pada hafalan, kepatuhan terhadap teks standar, serta terbatasnya kesempatan bagi siswa untuk membangun pemahaman secara mandiri. Permasalahan antara internalisasi dan indoktrinasi nilai Pancasila dalam pembelajaran PPKn adalah isu yang telah ada sejak beberapa generasi dan masih belum menemukan solusi yang memadai dari sudut pandang pedagogis (Suprayogi et al., 2024)

Dalam sudut pandang filsafat pendidikan, pendekatan ini berakar pada tradisi esensialisme keyakinan bahwa terdapat seperangkat nilai dan pengetahuan yang bersifat tetap dan harus diwariskan kepada generasi selanjutnya tanpa adanya perubahan (Giroux, 2020). Nilai yang terdapat dalam konteks ini bukan hanya sekadar perilaku, tetapi lebih kepada suatu epistemologi bahwa kebenaran telah ada, posisinya sudah ditentukan oleh otoritas, dan peran peserta didik adalah untuk menerimanya. Pandangan ini secara langsung bertentangan dengan tujuan demokratis PPKn yang menginginkan warga negara yang mampu berpikir, membuat keputusan, dan bertindak secara mandiri.

Sasaran Demokratis PPKn dan Kebutuhan Pemikiran Kritis

Pada sudut pandang yang berbeda, filsafat dalam pendidikan menempatkan pemikiran kritis sebagai dasar untuk menciptakan kewarganegaraan yang berarti. Westheimer & Kahne (2004) telah mengembangkan sebuah klasifikasi yang berpengaruh dengan membedakan tiga tipe warga negara yang dihasilkan dari berbagai program pendidikan kewarganegaraan: warga negara yang memiliki tanggung jawab pribadi (bertanggung jawab secara pribadi), warga negara yang aktif berpartisipasi (partisipatif), dan warga negara yang berfokus pada keadilan (berorientasi keadilan). Klasifikasi ketiga ini membentuk sebuah spektrum yang berkisar dari yang paling konservatif hingga yang paling transformatif.

Warga yang bertanggung jawab secara individu hanya perlu mengikuti undang-undang, membayar pajak, dan bertindak dengan integritas sebuah pola yang sangat sejalan dengan prinsip-prinsip kepatuhan militer. Sementara itu, warga yang peduli pada keadilan bukan hanya terlibat dalam sistem yang ada, tetapi juga dengan aktif berusaha dan berusaha merubah struktur sosial yang dianggap tidak adil. Penekanan pada kepatuhan dan kesetiaan yang merupakan elemen umum dalam pendidikan karakter justru dapat berlawanan dengan bentuk refleksi dan aksi kritis yang dianggap vital dalam masyarakat yang demokratis (Westheimer & Kahne, 2004).

Dalam konteks Indonesia, pendidikan kewarganegaraan yang transformatif sebagai tanggapan terhadap masalah kegagalan kewarganegaraan suatu kondisi dimana warga negara secara resmi memiliki hak-hak sipil namun tidak mampu atau tidak termotivasi untuk menggunakan hak-hak tersebut secara kritis dan reflektif (Banks, 2017). Pendidikan kewarganegaraan yang transformatif harus melebihi pengajaran tentang lembaga dan prosedur demokratis, dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menganalisis ketidakadilan struktural serta bertindak untuk mengatasinya (Banks, 2017). Ide ini secara langsung menantang pendekatan penyampaian informasi yang masih dominan dalam pengajaran PPKn di Indonesia.

Dalam rangkaian yang lebih luas terkait Asia Tenggara, kurikulum PPKn untuk abad ke-21 sebenarnya sudah dirancang untuk mengandung kemampuan kritis sebagai focus utama dalam pembelajaran (Jayadiputra et al., 2023). Namun, terdapat kesenjangan yang signifikan antara perencanaan kurikulum dan pelaksanaannya di ruang kelas, hal ini terutama disebabkan oleh system evaluasi yang masih mengandalkan pengukuran hafalan isi materi dari pada proses berpikir. Menurut Tirza et al. (2025) memperkuat penemuan ini dengan menciptakan alat penelitian untuk literasi digital dan pemahaman kritis yang khusus ditujukan untuk PPKn. Mereka menemukan bahwa ketidakadaan instrument yang tepat merupakan salah satu penghalang terbesar dalam mencapai tujuan Pendidikan kewarganegaraan yang demokratis di Indonesia. Dengan demikian, permasalahan yang ada tidak hanya berkaitan dengan orientasi pengajar atau budaya dalam kelas, tetapi juga mengenai ketidakjelasan system penilaian untuk mengenali dan menghargai kemampuan berpikir kritis sebagai pencapaian yang valid dan terukur.

Agus et al. (2025) menyampaikan bukti terbaru mengenai keadaan ini. Melalui studi yang menggunakan pendekatan campuran di lima sekolah menengah di Makassar, mereka menemukan bahwa meskipun kesadaran siswa menunjukkan integritas etis yang tinggi terutama terkait dengan keamanan informasi dan berita bohong partisipasi sipil mereka cenderung bersifat pasif. Para pengajar PPKn memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep kewarganegaraan kritis, namun pelaksanaannya terhalang oleh berbagai faktor sistemik: ketiadaan pelatihan, tuntutan kurikulum yang ketat, serta kurangnya dukungan dari institusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketegangan antara memenuhi tuntutan dan berpikir kritis bukan hanya isu filosofis yang bersifat teoritis, melainkan kenyataan pedagogis yang dialami setiap hari oleh guru dan siswa.

Ketegangan Konseptual: Transmisif berbanding Transformatif

Esensi ketegangan yang dianalisis dalam kajian ini berakar pada persaingan antara dua paradigma pendidikan yang bermusuhan. Paradigma transmisi melihat pendidikan sebagai cara untuk menyampaikan nilai, norma, dan ilmu yang telah ditetapkan dari sumber yang berotoritas kepada penerima yang tidak aktif. Di sisi lain, paradigma transformatif menganggap pendidikan sebagai suatu proses dialog yang membolehkan pelajar untuk secara aktif membangun pemahaman, mempertanyakan andaian, dan meningkatkan kesadaran kritis mengenai keadaan sosial mereka (Giroux, 2020).

Wicaksana (2024) mencatat ketegangan ini secara jelas dalam penelitiannya mengenai pengajaran Pancasila di Sekolah Indonesia Den Haag (SIDH). Ia menemukan bahwa pengajaran Pancasila sebenarnya adalah suatu proses yang bergerak di satu sisi mencakup nilai-nilai budaya,

sementara di sisi lainnya ada usaha intervensi yang kritis. Namun, dalam pelaksanaannya, metode yang paling umum tetap berpusat pada penghafalan dan penggunaan buku teks yang telah distandarisasi. Siswa diharapkan dapat mengingat definisi serta fakta sejarah terkait Pancasila, tetapi tidak diajak untuk berpartisipasi secara kritis dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya atau merenungkan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Situasi ini menimbulkan apa yang disebut oleh Wicaksana (2024) sebagai konflik identitas di kalangan siswa, yang terlihat pada nilai-nilai liberal dalam konteks sosial mereka, namun tetap memperoleh pendidikan kewarganegaraan yang bersifat mengatur.

Sunarso et al. (2024) memperkuat pandangan ini melalui telaah filosofis mengenai kurikulum PPKn di tingkat SMP. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa meskipun dalam normanya kurikulum PPKn dibuat untuk menguatkan identitas kewarganegaraan siswa dengan pendekatan filosofis yang terintegrasi, nyatanya ada ketidaksesuaian yang signifikan antara tujuan kurikuler dan praktik pembelajaran yang dilakukan. Ketidakselarasan ini terutama terlihat dalam sedikitnya penggabungan antara nilai-nilai Pancasila dan pengalaman nyata siswa sebuah kejadian penting bagi pembentukan kesadaran kritis yang sejati.

Dari perspektif pedagogis yang kritis, Giroux (2020) menegaskan bahwa pendidikan yang berfokus pada ketaatan tidak hanya tidak berhasil dalam membangun warga negara yang demokratis, tetapi juga secara aktif menciptakan situasi yang disebutnya depolitisasi penurunan kemampuan individu untuk memahami serta terlibat dengan aspek politik dari kehidupan sosial mereka. Dalam konteks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, depolitisasi ini terlihat ketika proses belajar lebih berfokus pada penguasaan hafalan poin-poin Pancasila dibandingkan dengan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kebijakan publik yang aktual.

Nugraha et al. (2024) dalam kajian mereka tentang pedagogi kritis Freire menegaskan bahwa konflik antara pendekatan transmisif dan transformatif melampaui sekadar metode pengajaran; hal ini mencerminkan perjuangan ideologis yang lebih dalam mengenai siapa yang berhak menentukan definisi tentang apa artinya menjadi warga negara yang baik. Selama definisi ini dimonopoli oleh otoritas kurikulum dan tidak tunduk pada tantangan kritis di dalam kelas, pendidikan kewarganegaraan terlepas dari tujuan normatifnya akan tetap menjadi mekanisme reproduksi sosial daripada berfungsi sebagai ruang untuk emansipasi. Relevansi gagasan Freire telah berkembang di zaman kontemporer karena tantangan yang dihadapi pendidikan kewarganegaraan saat ini tidak hanya bersifat pedagogis tetapi juga digital dan geopolitik pada siswa harus mengembangkan keterampilan berpikir kritis tidak hanya mengenai nilai-nilai abstrak tetapi juga mengenai arus

informasi, narasi nasional, dan tekanan konformitas yang muncul dari media sosial dan lingkungan sosial sehari-hari mereka (Takona, 2025).

Zakiah (2021) dari sudut pandang alat pengajaran menambahkan elemen praktis pada permasalahan ini. Penelitiannya menunjukkan bahwa alat ukur yang diterapkan dalam pendidikan PPKn di tingkat sekolah dasar belum dirancang dengan baik untuk secara akurat dan konsisten menilai kemampuan berpikir kritis. Bukannya menilai proses berpikir alat tersebut lebih fokus pada pengukuran pencapaian hafalan dan pemahaman teks. Situasi ini menciptakan siklus negatif metode pembelajaran yang tepat memproduksi alat penilaian yang tidak mampu menilai berpikir kritis, dan kurangnya alat yang berkualitas memperkuat pembelajaran yang mengutamakan hafalan.

Sintesis Konseptual: Patriotisme Kritis sebagai Jembatan

Berdasarkan syarat ketegangan konteks yang telah dibahas sebelumnya, studi ini mengusulkan sebuah sintesis yang melampaui batasan sederhana antara syarat dan pemikiran kritis. Sintesis ini disebut patriotisme kritis sebuah konsep yang memungkinkan kedua nilai ini bersatu dalam praktik pembelajaran PPKn. Patriotisme kritis tidak menjadikan kepatuhan sebagai penyerahan buta kepada kekuasaan, tetapi sebagai komitmen yang reflektif terhadap nilai-nilai demokrasi yang telah dipahami, diuji, dan dialami secara kritis oleh pelajar. Dalam konteks ini, seorang pelajar yang berpikir kritis justru dapat menjadi warga negara yang lebih patuh bukan karena paksaan, tetapi karena mereka memahami pentingnya aturan dan nilai-nilai tersebut bagi kehidupan sosial. Pemahaman ini menjadi dasar jaminan yang konsisten dan berkelanjutan, bukan jaminan yang rentan karena hanya mengandalkan paksaan dan penghafalan.

Sebelum kerangka ketiga teoritis disintesis tersebut, perlu ditegaskan bahwa (Banks, 2017; Giroux, 2020; Westheimer & Kahne, 2004) sesungguhnya berangkat dari tradisi filosofis yang tidak sepenuhnya sama. Westheimer dan Kahne berpijak pada tradisi liberal-demokratis, Giroux pada pedagogi dasar, sementara Banks lebih menekankan dimensi multikultural dan keadilan social. Meskipun demikian, perbedaan tradisi ini justru memperkaya sistematis yang diusulkan, karena masing-masing kerangka menyumbang perspektif yang saling melengkapi. Ketiganya bersepakat bahwa Pendidikan kewarganegaraan yang bermakna harus memberi ruang bagi peserta didik untuk memahami, merenungkan, dan menginternalisasi nilai-nilai secara aktif, bukan sekedar menerimanya secara pasif. Dan titik temu inilah konsep patriotism kritis menemukan landasannya.

Westheimer & Kahne (2004) menyediakan dasar yang solid untuk konstruksinya. Model kewarganegaraan yang mereka definisikan dengan fokus pada keadilan tidaklah menolak kepatuhan, melainkan menempatkannya dalam kerangka yang lebih luas: kepatuhan terhadap asas-asas keadilan

dan demokrasi, bukan sekadar tunduk kepada figur otoritas. Dalam pandangan ini, warga negara yang kritis akan lebih setia pada aturan yang adil dan lebih berani menolak perintah yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Banks (2017) menambahkan ke dalam kerangka ini konsep pendidikan kewarganegaraan yang transformatif, yang menuntut pengakuan atas keberagaman identitas budaya siswa sebagai titik awal, alih-alih menjadi penghalang, dalam pembentukan identitas kewarganegaraan nasional. Dalam setting multikultural Indonesia, nilai patriotisme sangat berarti karena mencerminkan kemampuan siswa untuk mencintai dan berkomitmen terhadap NKRI, hal ini muncul dari pemahaman kritis terhadap nilai-nilai Pancasila bukan sekadar mengingatnya. Kecintaan yang berasal dari pemahaman kritis ini jauh lebih kuat dan lebih mengedepankan prinsip demokrasi dibandingkan dengan kecintaan yang dibentuk melalui indoktrinasi.

Dalam konteks praktis, Agus et al. (2025) menjelaskan bahwa para pengajar PPKn sebenarnya telah memiliki pengetahuan yang memadai untuk menerapkan pendekatan ini termasuk metode seperti perdebatan kelompok mengenai media sosial, evaluasi berita, serta proyek berbasis tugas. Yang dibutuhkan adalah perubahan sistemik kurikulum yang lebih adaptif, pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk para guru, dan alat penilaian yang khusus dirancang untuk menilai kompetensi kritis bukan hanya sekedar pemahaman materi (Zakiah, 2021).

Dukungan berbasis fakta untuk gagasan patriotisme kritis juga terlihat dalam studi internasional. Kaya (2022) menunjukkan bahwa ada keterkaitan positif yang signifikan antara kemampuan berpikir kritis dan patriotisme yang konstruktif, serta keterkaitan negatif antara berpikir kritis dengan patriotisme yang buta yang berarti semakin kritis seseorang semakin besar kecenderungan untuk mencintai negaranya dengan cara yang reflektif dan bukan asal - asalan. Hasil penelitian ini secara langsung memperkuat premis patriotisme kritis yang diangkat dalam penelitian ini. Sejalan dengan ini, Elban & Aslan (2023) menemukan bahwa patriotisme konstruktif berfungsi sebagai penghubung antara nilai-nilai kemanusiaan mendasar dan partisipasi kewarganegaraan yang aktif menunjukkan bahwa kepatuhan yang reflektif justru mendorong partisipasi demokratis yang lebih bermakna. Dalam konteks Indonesia, rogram pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan oleh TNI di tingkat lokal mulai menunjukkan pergeseran dari pendekatan indoktrinasi menuju internalisasi nilai -nilai, meskipun proses transisi ini masih terjadi secara tidak merata (Damanik et al., 2025).

Perlu juga mencatat bahwa gagasan yang mencakup pemahaman dengan pemikiran kritis dalam pendidikan kewarganegaraan bukanlah hal yang sepenuhnya baru dalam khazanah sastra

internasional. Konsep seperti patriotisme reflektif dan kewarganegaraan kritis telah lebih dahulu diperkenalkan dalam didiskusikan akademis global.

Dalam kerangka ini, sangat penting untuk menekankan posisi patriotisme kritis yang diusulkan oleh penelitian ini di antara konsep-konsep yang telah ada. Merujuk pada pemikiran Tocqueville, memperkenalkan konsep patriotisme reflektif sebagai landasan bagi kesiapan kewarganegaraan yang demokratis, yaitu cinta tanah air yang tidak bersifat buta, melainkan berdasarkan pemahaman kritis terhadap konstitusi, nilai-nilai bersama, serta tanggung jawab sebagai warga negara (Carrese, 2023). Meskipun kedekatannya mengandung konsep yang jelas, patriotisme kritis yang diusulkan oleh penelitian ini memiliki ciri khas tersendiri: ia dikembangkan secara jelas dalam konteks pasca-kolonial dan pasca-otoriter di Indonesia, di mana ketegangan antara kepatuhan dan pemikiran kritis tidak hanya memuat filosofis, tetapi merupakan warisan sejarah yang masih berlanjut dalam praktik pembelajaran. Bandingkan dengan konteks di Asia Tenggara lainnya juga memperkaya kerangka ini, mereka mengenai pendidikan kewarganegaraan di Singapura menemukan dinamika yang sangat mirip sistem pendidikan yang secara resmi menginginkan warga negara yang demokratis, tetapi dalam praktiknya justru menghasilkan konformitas dan loyalitas yang pasif terhadap negara (Chia & Neoh, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa ketegangan yang dibahas dalam studi ini bukanlah sesuatu yang terbatas di Indonesia, tetapi merupakan tantangan yang dihadapi bersama oleh demokrasi negara-negara di Asia Tenggara yang mewarisi sistem pendidikan yang otoriter. Yang menjadikan Indonesia berbeda dan menjadikan gagasan patriotisme kritis memiliki relevansi di tingkat lokal adalah adanya Pancasila sebagai landasan nilai-nilai yang secara mendasar memiliki potensi untuk memerdekakan, menjamin pengajaran dengan cara yang transformatif, bukan hanya sekedar diingat.

Oleh karena itu, patriotisme yang penting bukanlah sebuah ide yang idealistis yang mengesampingkan konteks budaya serta struktur di Indonesia. Ini adalah suatu reaksi yang pragmatis dan positif terhadap ketegangan yang ada sebuah metode untuk mengekspresikan komitmen dan berpikir dengan kritis tidak hanya bersebelahan melainkan saling mendukung dalam proses menciptakan warga negara yang demokratis, reflektif, dan berpegang pada nilai-nilai Pancasila.

SIMPULAN

Penelitian ini telah mengungkap adanya konflik filosofis yang mendasar dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Indonesia. Konflik ini muncul antara warisan nilai-nilai pemenuhan yang diwajibkan oleh kultur militeristik Orde Baru dan kebutuhan akan tuntutan

demokrasi yang ingin menciptakan warga negara yang kritis, reflektif, serta partisipatif. Ketegangan tersebut bukan hanya masalah teknis dalam pengajaran tetapi merupakan refleksi dari pertarungan ideologi yang lebih mendalam mengenai arti menjadi warga negara Indonesia yang baik dalam konteks demokrasi saat ini. Melalui analisis literatur yang dilakukan secara sistematis terhadap 21 sumber yang terdiri dari artikel jurnal nasional maupun internasional berindeks serta satu monografi referensi ditemukan empat temuan utama yang saling berhubungan.

Pertama-tama, budaya pembelajaran PPKn yang bersifat transmisi bukanlah pilihan pedagogis yang disadar, tetapi hasil dari sejarah panjang pemanfaatan pendidikan sebagai alat untuk membentuk komunitas sejak masa Orde Baru. Warisan ini tidak hanya tersimpan dalam bentuk materi yang dapat dipelajari melalui penghafalan poin-poin Pancasila, melainkan juga meresap ke dalam struktur kurikulum, metode penilaian, dan budaya lembaga pendidikan yang secara keseluruhan belum mendukung pengembangan kemampuan kritis para siswa. Pendekatan ini berakar pada tradisi esensialisme yang memandang kebenaran sebagai sesuatu yang sudah ditentukan oleh pihak yang berwenang sedangkan tugas siswa adalah menerima saja pandangan yang bertentangan dengan tujuan demokratis dari PPKn itu sendiri.

Kedua, terdapat ketidakcocokan yang cukup nyata antara target ideal kurikulum PPKn dan pelaksanaan pembelajaran di lapangan. Ketidakcocokan ini bukan hanya disebabkan oleh dedikasi guru, tetapi juga karena kurangnya sistem pendukung yang terintegrasi dari alat penilaian yang dapat mengukur kemampuan berpikir kritis, pelatihan guru yang fokus pada refleksi terhadap praktik yang sebenarnya hingga kurikulum yang memberi peluang untuk membahas isu-isu terkini yang relevan dengan dunia digital dan sosial siswa. Selama elemen ketiga ini tidak dijelaskan bersama-sama perubahan pada satu aspek saja tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan dan berkelanjutan.

Keempat, konflik antara penguasaan dan pemikiran kritis sebenarnya tidak perlu dianggap sebagai masalah yang tidak dapat diatasi. Keduanya dapat diintegrasikan dengan cara yang menguntungkan melalui konsep patriotisme kritis suatu pendekatan kewarganegaraan di mana dedikasi terhadap nilai-nilai Pancasila dan konstitusi muncul bukan dari kepatuhan yang buta, tetapi berasal dari pemahaman yang mendalam, refleksi yang tulus, dan kesadaran kritis terhadap kondisi sosial. Berbeda dengan gagasan patriotisme yang reflektif yang muncul dalam konteks demokrasi liberal Barat patriotisme kritis yang dikemukakan oleh penelitian ini dikhususkan untuk konteks pasca-kolonial dan pasca-otoriter di Indonesia di mana Pancasila sebagai nilai dasar memiliki kemampuan memerdekakan yang justru akan lebih kuat jika diajarkan secara transformatif daripada

sekadar dihapal. Dalam kerangka ini, mencintai tanah air dan memahami kebijakan negara bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan merupakan dua aspek dari satu koin yang sama keduanya penting untuk menciptakan warga negara yang benar-benar berdaulat dari segi intelektual dan halus dalam praktik demokratis.

Oleh karena itu, apa yang diperlukan oleh Indonesia bukan hanya modifikasi metode pengajaran di kelas, tetapi juga perubahan mendasar dalam filosofi yang mencakup tujuan PPKn itu sendiri di tiga tingkat sekaligus yaitu kurikulum yang dirancang ulang dari pendekatan yang hanya menyampaikan informasi menjadi pendekatan yang transformatif dengan menempatkan pemikiran kritis sebagai kompetensi utama praktik pengajaran yang mengalihkan posisi guru dari penyaji materi menjadi fasilitator dalam diskusi kritis dengan menggunakan metode seperti diskusi soal moral, analisis kebijakan publik, dan proyek kewarganegaraan yang melibatkan masyarakat dan sistem evaluasi yang dikhususkan untuk menilai proses berpikir kritis, bukan hanya sekedar penguasaan materi yang dihafal. Aspek ketiga ini harus dilaksanakan secara bersamaan, karena inovasi dalam pengajaran tanpa adanya reformasi dalam penilaian tidak akan diakui secara resmi sedangkan kurikulum yang memperbarui tanpa peningkatan dalam pengembangan guru profesional hanya akan menghasilkan perubahan yang tampak di atas kertas saja. dan pada akhirnya, patriotisme yang penting bukanlah konsep idealis yang mengabaikan konteks budaya dan struktur sosial di Indonesia. Ini adalah respon yang praktis dan produktif terhadap ketegangan yang ada sebuah pandangan tentang PPKn di mana siswa diajarkan untuk mencintai tanah airnya dengan cara memahami, menganalisis, dan memperjuangkan nilai-nilai terbaik yang terkandung di dalamnya. Inilah esensi dari patriotisme yang penting, dan inilah tujuan yang seharusnya dicapai oleh PPKn Indonesia di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A. A., Rizal, A., Muhajir, M., & Jamalong, A. (2025). From awareness to action: Rethinking high school civic education for the digital generation in Indonesia. *Cogent Education*, 12(1), 2534156. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2534156>
- Banks, J. A. (2017). Failed Citizenship and Transformative Civic Education. *Educational Researcher*, 46(7), 366–377. <https://doi.org/10.3102/0013189X17726741>
- Carrese, P. (2023). Civic Preparation of American Youth: Reflective Patriotism and Our Constitutional Democracy. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 705(1), 39–52. <https://doi.org/10.1177/00027162231192166>

- Chalaune, B. S. (2021). Paulo Freire's Critical Pedagogy in Educational Transformation. *International Journal of Research -GRANTHAALAYAH*, 9(4), 185–194. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i4.2021.3813>
- Chia, Y.-T., & Neoh, J. Y. (2024). Latent democratic potential: Reflections on contemporary citizenship education in Singapore. *Curriculum Perspectives*, 44(4), 475–487. <https://doi.org/10.1007/s41297-024-00270-x>
- Damanik, B. H., Humaizi, H., Zulkarnain, I., & Lubis, L. A. (2025). Civic Education Through Military-Civil Collaboration: A Communication Strategy Model by Kodim 0317/TBK for Senior High School Students in Indonesia. *Educational Process International Journal*, 17(1). <https://doi.org/10.22521/edupij.2025.17.338>
- Elban, M., & Aslan, S. (2023). The role of constructive patriotism in the relationship of basic human values and active citizenship for emerging adults in Türkiye. *BMC Psychology*, 11(1), 206. <https://doi.org/10.1186/s40359-023-01233-z>
- Farchan, Y. (2022). Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru. *Jurnal Adhikari*, 1(3), 152–161. <https://doi.org/10.53968/ja.v1i3.41>
- Giroux, H. A. (2020). *On Critical Pedagogy*. Bloomsbury Academic. <https://doi.org/10.5040/9781350145016>
- Jayadiputra, E., Karim, A. A., Sapriya, S., & Rahmat, R. (2023). The Pancasila and Civic Education curriculum model at 21st century. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(1), 65–74. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i1.49455>
- Kaya, M. M. (2022). *Blind patriotism is out and constructive patriotism is in: Critical thinking is the key to global citizenship*. <https://jsser.org/index.php/jsser/article/view/4074>
- Murdiono, M., & Wuryandani, W. (2021). Civic and nationalism education for young Indonesian generation in the globalization era. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 158–171. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.39452>
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Salsabila, N. A., Larassati, S., & Marzuki, M. I. (2024). Pancasila Era Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 2(4), 32–56. <https://doi.org/10.59581/garuda.v2i4.4258>
- Nugraha, A. E., Wibowo, D., & Hendrawan, B. (2024). Paulo Freire's Critical Pedagogy Analysis Of Educational Transformation. *MSJ: Majority Science Journal*, 2(2), 220–228. <https://doi.org/10.61942/msj.v2i2.157>
- Puspita Sari, V., & Suryaningsi, S. (2023). Education For Indonesian Citizens: From Good Citizens

- to Active Citizens. *Asian Journal of Social and Humanities*, 1(10), 695–706. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i10.73>
- Sunarso, S., Hidayah, Y., Firmasnyah, A., & Arpanudin, I. (2024). Content analysis of Pancasila and Civic Education curriculum at the junior high school level in Indonesia: Philosophical perspectives in affirming civic identity. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 21(1), 98–106. <https://doi.org/10.21831/jc.v21i1.63161>
- Suprayogi, S., Rahmawati, E., Rafiâ€™uddin, H., & Wiratomo, G. H. (2024). Problematika antara Internalisasi dan Indoktrinasi Nilai Pancasila dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 9(1), 98–106. <https://doi.org/10.21067/jmk.v9i1.10347>
- Takona, J. P. (2025). Transformative education: Paulo Freire’s pedagogy of the oppressed and its contemporary resonance. *Journal of Global Education and Research*, 9(1), 87–107. <https://doi.org/10.5038/2577-509X.9.1.1351>
- Tirza, J., Tambunan, A., Parwati, N. N., & Cendana, W. (2025). Enhancing active citizenship: Developing assessment tools for digital literacy and critical thinking in Indonesian Civics Education. *REID (Research and Evaluation in Education)*, 11(1), 75–88. <https://doi.org/10.21831/reid.v11i1.83859>
- Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). What Kind of Citizen? The Politics of Educating for Democracy. *American Educational Research Journal*, 41(2), 237–269. <https://doi.org/10.3102/00028312041002237>
- Wicaksana, I. A. (2024). Pancasila in National Curriculum: Political Education or Doctrination? *PCD Journal*, 11(2), 349–376. <https://doi.org/10.22146/pcd.v11i2.10105>
- Zakiah, L. (2021). Pengembangan Instrumen Keterampilan Berpikir Kritis Pada Pembelajaran Ppkn Sd. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(02), 272–281. <https://doi.org/10.21009/jpd.v11i02.19056>